

PKN SEBAGAI
PENDIDIKAN POLITIK/
PENDIDIKAN
DEMOKRASI



PARADIGAMA BARU PKn

(Direktorat PSMP, 2006)

- PKn merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi **pendidikan demokrasi** di Indonesia yang dilaksanakan melalui :
- *Civic Intellegence*, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial.
- *Civic Responsibility*, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan
- *Civic Participation*, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

PKN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK

Prewitt & Dawson (1977 : 140 – 141) menyatakan ada tipe pengajaran politik yaitu PKN (*civic education*) dan indoktrinasi politik. James Coleman, membedakan antara kedua tipe itu, bahwa PKN atau latihan kewarganegaraan (*civic training*) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Dan yang dimaksud indoktrinasi politik lebih memperhatikan belajar ideologi politik tertentu yang dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjastifikasi rezim tertentu

KONSEP PENDIDIKAN POLITIK

Alfian (1992), dalam bukunya *Pemikiran Dan Perubahan politik Indonesia* menyatakan "Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun" (p.235).

PENGGUKURAN SOSIALISASI POLITIK

Political socialization may be measured through the use of indexes, the most important of which are:

1. Political efficacy (merasa memiliki kekuasaan untuk dapat mempengaruhi keputusan politik);
2. Political trust (kepercayaan terhadap pemerintah dan pejabatnya);
3. Citizen duty;
4. Political participation;
5. Political knowledge (terutama yang berkaitan dengan cara bekerjanya sistem politik);
6. Other nation or world concept (persepsi mengenai hubungan bangsanya dengan masyarakat dunia)

All the concepts have been stressed in traditional civic education projects (Byron G. Massialas (Editor), Political Youth, Traditional Schools, p. 3-5).

Maka konsekuensinya:“Pendidikan

Kewarganegaraan adalah suatu proses yg dilakukan oleh lembaga pendidikan dg proses mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat” (Zamroni, 2007 : p.137).

PKN SBG PENDIDIKAN DEMOKRASI

Menurut Lord Henry P. Broughton (Zamroni, 2007, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi*, p.156-157) Pendidikan demokrasi adalah “mendidik warga masyarakat yang gampang dipimpin tetapi sulit dipaksa, gampang diperintah tetapi sulit diperbudak”. Oleh karena itu pendidikan demokrasi menekankan pada kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab..

Snauwaert (2001) , Cosmopolitan democracy and democratic education, lihat juga Zamroni, 2007. Pendidikan demokrasi senantiasa harus mendasarkan diri pada prinsip prinsip kemanusiaan, dan menitik beratkan pada tujuan untuk mengembangkan pada diri peserta didik, emphati, respek pada yang lain, dan memiliki pandangan sebagai warga negara bangsa dan global.

Zamroni (2007) menyatakan pendidikan demokrasi harus menekankan pada pengembangan *intellectual skill, personal skill and social skill*. *Intellectual skill* ditekankan pada pengembangan critical thinking peserta didik, bukannya knowledge deposit. *Personal skill* ditekankan pada pengembangan percaya diri dan political self efficacy. Sedangkan pengembangan *social skill* terutama ditekankan emphati dan respek pada orang lain (p.63).

PKN SBG PENDIDIKAN POLITIK SELALU TERKAIT DG AGAMA

Al Gazali dalam Fatihat ul 'ulum menegaskan ada 6 buah ilmu pokok yg terbagi menjadi connected with Religion dan unconnected with Religion. Yg pertama meliputi : metafisika, politik, akhlak/ilmu jiwa. Sedangkan yg kedua mencakup: ilmu pasti, logika dan ilmu alam. Coba bandingkan dg pendapat Bung Hatta : Sila I & II sbg fundamental moral dan Sila III, IV, V sbg fundamental politik . Konsekuensinya politik itu harus berdimensi moral/agama .